

## **BABVII**

### **KINERJAPENYELENGGARAAN DINAS**

### **PENDIDIKAN**

Penetapan indikator dalam pembangunan urusan pendidikan pada Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2023-2026 mempedomani Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2023-2026 dan Rencana Strategis Kementerian Pendidikan Tahun 2020-2024. Selain itu, Penentuan target kinerja memperhatikan faktor internal dan eksternal Dinas Pendidikan selama empat tahun mendatang.

#### **Penetapan Indikator Kinerja Dinas**

Pendidikan bertujuan memberikan gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian pembangunan pada urusan pendidikan dan untuk mendukung pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU)

Daerah dan Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Kunci (IKK). Berikut ini penetapan target indikator kinerja tujuan dan sasaran Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2023-2026.

#### **8.1. Indikator Kinerja Tujuan dan Target**

Tujuan merupakan suatu keadaan yang akan dicapai atau dihasilkandalamjangkawaktulebih dari 1 (satu) tahun, yang dijabarkan dengan target pencapaian setiap tahunnya. Indikator kinerja tujuan yang telah dirumuskan dan ditetapkan dalam Renstra 2023-2026 Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung adalah sebanyak 2 indikator, yaitu:

1. Tujuan 1: Meningkatnya rata-rata lama sekolah dan harapan lama sekolah.
2. Tujuan 2: Mewujudkan Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah

Rumusan indikator kinerja tujuan dan target-target selama empat tahun dapat dilihat pada tabel VII.1.

#### **8.2. Indikator Kinerja Sasaran dan Target**

Sasaran merupakan rumus kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil perangkat daerah yang diperoleh dari pencapaian outcome program

perangkat daerah. Karenanya sasaran harus bisa diukur dengan indikator yang tepat dan target-target yang tepat dan diperkirakan dapat dicapai.

Sasaran dalam Renstra 2023-2026 Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung telah dirumuskan dan ditetapkan agar dapat mencapai tujuan pembangunan Dinas Pendidikan. Indikator kinerja dari 4 (empat) sasaran telah dirumuskan dan telah ditentukan 4 (empat) indikator kinerja untuk mengukurnya. Berikut sasaran yang harus dicapai oleh Dinas Pendidikan:

1. Sasaran 1: Meningkatkan akses pendidikan
2. Sasaran 2: Meningkatkan mutu pendidikan
3. Sasaran 3: Meningkatkan relevansi dan daya saing
4. Sasaran 2: Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan, dengan indikator kinerja: Indeks Reformasi Birokrasi

#### Penjelasan

mengenai sasaran dengan indikator kinerjanya, selama empat tahun ditampilkan dalam tabel VII.2.

**Tabel VII.1**  
Target Indikator Kinerja Tujuan Rencana Strategis Dinas Pendidikan 2023-2026  
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

NO	TUJUAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN	Kondisi Awal Renstra	TARGE				Kondisi akhir Renstra
				2023	2024	2025	2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Meningkatnya rata-rata lama	Angka rata-rata lama sekolah	8,06	8,14	8,2	8,26	8,32	8,32
	Meningkatnya harapan lama	Angka harapan lama sekolah	12,05	12,24	12,31	12,38	12,45	12,45
2	Mewujudkan reformasi birokrasi perangkat daerah	Indeks reformasi perangkat daerah	90	90	90	90	90	90

**Tabel VII.2**  
Target Indikator Kinerja Sasaran Tujuan Rencana Strategis Dinas Pendidikan 2023-2026  
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA SASARAN	Kondisi Awal Renstra	TARGET			akhir RPD	Kondisi Akhir Renstra
				2023	2024	2025	2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Meningkatnya akses pendidikan masyarakat	APS usia 16-18 tahun	68,15	100	100	100	100	100
		APK Pendidikan Menengah	86,49	90,5	91	91,5	92	92
		APS 4-18 tahun yang berkebutuhan khusus	65	100	100	100	100	100
		APK Pendidikan khusus	65	70	75	80	85	85
2	Meningkatnya mutu pendidikan	Rata-rata Nilai Asesmen Nasional	1,87	2,17	2,32	2,47	2,62	2,62
		Rata-rata kompetensi Literasi SMA berdasarkan Asesmen Nasional		2,23	2,38	2,53	2,68	2,68
		Rata-rata Kompetensi Numerasi SMA berdasarkan Asesmen Nasional		2,08	2,23	2,38	2,53	2,53

		Rata-rata Kompetensi Literasi SMK berdasarkan Asesmen Nasional		2,2	2,35	2,5	2,65	2,65
		Rata-rata Kompetensi Numerasi SMK berdasarkan Asesmen Nasional		2,03	2,18	2,33	2,48	2,48
		Rata-rata kompetensi Literasi SMALB berdasarkan Asesmen Nasional		2,36	2,51	2,66	2,81	2,81
		Rata-rata kompetensi Numerasi SMALB berdasarkan Asesmen Nasional		2,43	2,58	2,73	2,88	2,88
		Rata-rata kompetensi Literasi SMPLB berdasarkan Asesmen Nasional		2,01	2,16	2,31	2,46	2,46
		Rata-rata kompetensi Numerasi SMPLB berdasarkan Asesmen Nasional		1,94	2,09	2,24	2,39	2,39
		Rata-rata kompetensi Literasi SDLB berdasarkan Asesmen Nasional		2,06	2,21	2,36	2,51	2,51
		Rata-rata kompetensi Numerasi SDLB berdasarkan Asesmen Nasional		2,34	2,49	2,64	2,79	2,79
3	Meningkatnyarelevansidandayasaing	Persentase lulusan sekolah menengah yang bekerja sesuai dengan keahlian/melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi	-	82,5	83,5	84,5	85,0	85,0
		Tingkat Kepuasan dan keterjeratan terhadap budaya kerja	-	80	81	82	83	83
2	Meningkatkan Tata Kelola internal Perangkat Daerah	Nilai RB Perangkat Daerah	90	90	90	90	90	90



BAB V  
STRATEGI DAN KEBIJAKAN

Agar tercapainya tujuan serta sasaran pembangunan bidang pendidikan, perlu ditetapkan strategi dan kebijakan pelaksanaan pembangunan bidang pendidikan untuk menjamin tercapainya target sasaran yang telah ditetapkan diatas. Penetapan strategi dan kebijakan ini tentunya telah diselaraskan dengan strategi dan kebijakan daerah serta rencana program prioritas dalam RPJPD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tahun 2023-2026.

Strategi dan arah kebijakan sendiri merupakan rumusan perencanaan komperhensif tentang bagaimana Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung mencapai tujuan dan sasaran dengan efektif dan efisien. Dengan pendekatan yang komprehensif, strategi juga dapat digunakan sebagai sarana untuk melakukan tranformasi, reformasi, dan perbaikan kinerja birokrasi. Perencanaan strategik tidak saja mengagendakan aktivitas pembangunan, tetapi juga segala program yang mendukung dan menciptakan layanan masyarakat tersebut dapat dilakukan dengan baik, termasuk di dalamnya upaya memberbaiki kinerja dan kapasitas birokrasi, sistem manajemen, dan pemanfaatan teknologi informasi.

Berikut adalah perumusan strategi dan kebijakan umum untuk setiap upaya pencapaian target sasaran pembangunan bidang pendidikan:

Tabel 5.1  
Keselarasan Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan Umum

Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
Meningkatkan rata-rata lama sekolah dan Meningkatkan angka harapan lama sekolah	Meningkatnya akses pendidikan masyarakat	Meningkatkan pengelolaan pendidikan berbasis sekolah dan masyarakat	1. Meningkatkan Angka partisipasi SMA melalui penambahan daya tampung, pemerataan guru dan tenaga pendidikan, dan bantuan bagi siswa tidak mampu, 2. Meningkatkan Angka partisipasi SMK melalui penambahan daya tampung, pemerataan guru dan tenaga pendidikan, dan bantuan bagi siswa tidak mampu, 3. Meningkatkan Angka Partisipasi Pendidikan Khusus melalui penambahan daya tampung, pemerataan guru dan tenaga pendidikan, dan bantuan bagi siswa tidak mampu,
	Meningkatnya mutu pendidikan	Meningkatkan pengelolaan pendidikan berbasis sekolah dan masyarakat	1. Meningkatkan sekolah terakreditasi A 2. Mengintegrasikan kurikulum muatan lokal (STEAM/STEM) dengan kurikulum nasional. 3. Menganalisa kebutuhan Pendidik dan Tenaga Kependidikan sesuai dengan kompetensi 4. Melaksanakan apresiasi dan publikasi kesastraan 5. Meningkatkan guru yang bersertifikat pendidik.

Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
	Meningkatnya relevansi dan daya saing	Meningkatkan pengelolaan pendidikan berbasis sekolah dan masyarakat	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Meningkatkan lulusan SMK yang memiliki sertifikat kompetensi melalui peningkatan jumlah assessor</li><li>2. Meningkatkan lulusan SMK yang terserap di DUDIKA</li><li>3. Peningkatan jumlah siswa SMK yang melanjutkan pendidikan di PTN dan PTS</li><li>4. Peningkatan jumlah siswa SMA yang melanjutkan pendidikan di PTN dan PTS</li><li>5. Peningkatan jumlah siswa PK yang melanjutkan pendidikan di PTN dan PTS</li><li>6. Peningkatan jumlah lulusan SMA yang memiliki kompetensi TIK</li><li>7. Peningkatan jumlah lulusan SMK yang memiliki kompetensi TIK.</li></ol>
Mewujudkan Reformasi birokrasi Perangkat Daerah	Meningkatkan Tata Kelola internal Perangkat Daerah	Meningkatkan Nilai SAKIP Perangkat Daerah	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Melakukan penyusunan dokumen perencanaan dengan baik</li><li>2. Melakukan pelaporan kegiatan yang akuntabel</li><li>3. Meningkatkan pelayanan internal yang optimal</li></ol>

### BAB VI

## RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF

### 1.1. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN

Program Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung merupakan program prioritas yang sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung serta struktur organisasi dan tata kerja Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung .

Rencana program prioritas beserta indikator keluaran program dan pagu Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, selanjutnya dijabarkan kedalam rencana kegiatan untuk setiap program prioritas tersebut. Pemilihan kegiatan untuk masing-masing program prioritas ini didasarkan atas strategi dan kebijakan jangka menengah sebagaimana yang tercantum pada bab sebelumnya.

Adapun Program yang akan dilaksanakan yaitu sebagai berikut :

**Tabel 6.1. Program dan Jumlah Kegiatan**

No	Nama Program
1	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
2	Program Pengelolaan Pendidikan
3	Program Pengembangan Kurikulum
4	Program Pendidik Dan Tenaga Kependidikan
5	Pengembangan Bahasa dan Sastra



## **1.2. INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PAGU INDIKATIF**

Untuk menguji tingkat keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan tentu saja diperlukan adanya indikator kinerja untuk setiap program dan kegiatan beserta kelompok sasaran serta pagu indikatif untuk setiap kegiatan. Keselaran antara sasaran, program dan kegiatan beserta target kinerja dan pagu indikatif untuk masing-masing pelaksanaan kegiatan dapat dilihat pada tabel berikut :

BAB IV  
TUJUAN DAN SASARAN

4.1. TUJUAN DAN SASARAN

Pelaksanaan tujuandansasarandaerah yang tertuangdalamdokumenRencana Pembangunan Daerah ProvinsiKepulauan Bangka Belitung Tahun 2023-2026 tentu saja diperlukan adanya penetapandandukungan tujuan dan sasarandariperangkatdaerah.Tujuan yang ditetapkan tersebut merupakan hal-hal yang perlu dilakukan untuk memecahkan permasalahandan menangani isu strategis daerah yang dihadapi.

Pernyataan tujuan tersebut akan diterjemahkan ke dalam sasaran yang ingin dicapaiolehDinasPendidikanProvinsiKep. Bangka Belitung.Karenanya tujuandansasaran disusun guna memperjelas pencapaiantujuandan sasaran yang ingin dicapai dari Rencana Pembangunan Daerah. Tujuan dari rencana pembangunan urusan pendidikan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung untuk tahun 2023-2026 dirumuskan sebagai berikut:

Tabel 4.1.  
Rumusan Tujuan

Isu Strategis	Rumusan Tujuan
Masih rendahnya angka rata-rata lama sekolah dan angka harapan lama sekolah.	Meningkatkan rata-rata lama sekolahdanMeningkatkanangkaharapan lama sekolah
MengoptimalkanindeksReformasibirokrasi	Mewujudkan Reformasi birokrasi Perangkat Daerah

Tujuan	IndikatorTujuan
Meningkatkan rata-rata lama sekolahdanMeningkatkanangkaharapan lama sekolah	Angka rata-rata lama sekolahdanAngkaHarapan Lama Sekolah
Mewujudkan Reformasi birokrasi Perangkat Daerah	IndeksreformasiBirokrasiPerangkat Daerah

Sasaran yang ingin dicapai dari tujuan diatas dirumuskan sebagai berikut:

1. Meningkatkan rata-rata lama sekolahdanMeningkatkanangkaharapan lama sekolah
- Difokuskan pada sasaran :
- a. Meningkatnya akses pendidikan masyarakat

- b. Meningkatnya mutu pendidikan
  - c. Meningkatnya relevansi dan daya saing
2. Mewujudkan Reformasi birokrasi Perangkat DaerahDifokuskan pada sasaran :
- a. MeningkatnyaIndeksreformasiBirokrasiPerangkat Daerah

Keselarasan tujuan dan sasaran diatas dapat dilihat pada tabel berikut :

**Tabel 4.2.**  
**Keselarasan Tujuan dan Sasaran dan Indikator Sasaran**  
**Pembangunan Bidang Pendidikan**

Tujuan	IndikatorTujuan	Sasaran	IndikatorSasaran
Meningkatkan rata-rata lama sekolahdanMen ingkatkanangka harapan lama sekolah	Angka rata-rata lama sekolahdanAngk aHarapan Lama Sekolah	Meningkatnyaa ksespendidikan masyarakat	APS usia 16-18 tahun
			APK Pendidikan Menengah
			APS 4-18 tahun yang berkebutuhan khusus
			APK Pendidikankhusus
		Meningkatnyam utupendidikan	Rata-rata Nilai Assemen Nasional
		Meningkatnya relevansi dan daya saing	Persentaseulusansekolahmen engah yang bekerjasesuaidengankeahlian /melanjutkankejenjangyanglebih tinggi
			Tingkat Kepuasanduniakerjaterhadap budayakerjalulusan SMK
Mewujudkan Reformasi birokrasi Perangkat Daerah	Indeksreformasi BirokrasiPerang kat Daerah	Meningkatkan Tata Kelola internal Perangkat Daerah	Nilai RB Perangkat Daerah

Target indicator kinerja Tujuandansasaran pada rencana strategis Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2023-2026 dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 4.3.**  
**Tujuan dan target indikator Tujuan**

TUJUAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN	KONDISI AWAL (2021)	Target Kinerja Sasaran				KONDISI AKHIR
			2023	2024	2025	2026	
Meningkatkan rata-rata lama sekolahdanMenin gkatkanangkahar apan lama sekolah	Angka rata-rata lama sekolah	8,06	8,14	8,2	8,26	8,32	8,32
	AngkaHara pan Lama Sekolah	12,05	12,24	12,31	12,38	12,45	12,45

Mewujudkan Reformasi birokrasi Perangkat Daerah	IndeksreformasiBirokrasiPerangkat Daerah	90	90	90	90	90	90
---	--	----	----	----	----	----	----

**Tabel 4.4.**  
**Sasaran dan target indikator sasaran**

SASARAN	INDIKATOR KINERJA SASARAN	KONDISI AWAL	Target Kinerja Sasaran				KONDISI AKHIR
			2023	2024	2025	2026	
Meningkatnya aksespendidikan masyarakat	APS usia 16-18 tahun	68,15	100	100	100	100	100
	APK Pendidikan Menengah	86,49	90,5	91	91,5	92	92
	APS 4-18 tahun yang berkebutuhan khusus	65	100	100	100	100	100
	APK Pendidikan khusus	65	70	75	80	85	85
Meningkatnya mutu pendidikan	Rata-rata Nilai Assemen Nasional :	1,87	2,17	2,32	2,47	2,62	2,62
	Rata-rata kompetensi Literasi SMA berdasarkan Asesmen Nasional		2,23	2,38	2,53	2,68	2,68
	Rata-rata Kompetensi Numerasi SMA berdasarkan Asesmen Nasional		2,08	2,23	2,38	2,53	2,53
	Rata-rata Kompetensi Literasi SMK berdasarkan Asesmen Nasional		2,2	2,35	2,5	2,65	2,65
	Rata-rata Kompetensi Numerasi SMK berdasarkan Asesmen Nasional		2,03	2,18	2,33	2,48	2,48

	Rata-rata kompetensi Literasi SMALB berdasarkan Asesmen Nasional		2,36	2,51	2,66	2,81	2,81
	Rata-rata kompetensi Numerasi SMALB berdasarkan Asesmen Nasional		2,43	2,58	2,73	2,88	2,88
	Rata-rata kompetensi Literasi SMPLB berdasarkan Asesmen Nasional		2,01	2,16	2,31	2,46	2,46
	Rata-rata kompetensi Numerasi SMPLB berdasarkan Asesmen Nasional		1,94	2,09	2,24	2,39	2,39
	Rata-rata kompetensi Literasi SDLB berdasarkan Asesmen Nasional		2,06	2,21	2,36	2,51	2,51
	Rata-rata kompetensi Numerasi SDLB berdasarkan Asesmen Nasional		2,34	2,49	2,64	2,79	2,79
Meningkatnya relevansi dan daya saing	Persentase lulusan sekolah menengah yang bekerja sesuai dengan keahlian/melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi	-	82,5	83,5	84,5	85,0	85,0
	Tingkat Kepuasan dan keterhadapan budaya kerja di lingkungan SMK	-	80	81	82	83	83
Meningkatkan Tata Kelola internal Perangkat Daerah	Nilai RB Perangkat Daerah	90	90	90	90	90	90

### **BAB III**

## **PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI**

### **3.1. IDENTIFIKASI PERMASALAHAN BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI PELAYANAN DINAS PENDIDIKAN PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG**

Peningkatan dalam berbagai indikator pembangunan pendidikan sudah baik, seperti angka partisipasi pendidikan, pemerataan mutu pendidikan, relevansi pendidikan, tetapi masih terdapat sejumlah permasalahan. Permasalahan tersebut adalah: (1) angka partisipasi pendidikan menengah dan pendidikan khusus belum 100 persen sesuai target Standar pelayanan Minimal (SPM); (2) masih rendahnya hasil pembelajaran; (3) masih rendahnya persentase lulusan sekolah menengah yang bekerja sesuai dengan keahlian dan atau melanjutkan ke jenjang yg lebih tinggi.

Faktor yang mempengaruhi mutu pendidikan ini diantaranya pemenuhan 8 standar nasional pendidikan, kompetensi guru yang masih rendah, perlunya dukungan masyarakat dibidang pendidikan serta diperlukan adanya motivasi belajar bagi siswa agar mampu meraih prestasi. Khusus untuk pendidikan vokasi (SMK) diketahui bahwa belum relevan antara program keahlian SMK dengan potensi daerah serta potensi kebutuhan tenaga kerja di pasaran. Hal ini sangat dipengaruhi oleh ketersediaan sarana praktik produktif di SMK, ketersediaan Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) di SMK, keterbatasan guru produktif dan perlunya dukungan Dunia Usaha dan Dunia Industri serta instansi teknis pemerintah terkait lainnya dalam penyelenggaraan pendidikan vokasi.

Faktor lain yang mempengaruhi mutu pendidikan adalah masih kurangnya sarana dan prasarana pendidikan, kondisi sarpras yang harus direhabilitasi dan pemenuhannya pada daerah harus dibangun. Pembangunan dan peningkatan sarpras ini merupakan upaya untuk mendekatkan akses layanan atau memperluas cakupan layanan. Identifikasi permasalahan penyelenggaraan pendidikan di Provinsi Kepulauan bangka Belitung dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.1.  
Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Dinas Pendidikan  
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Aspek Kajian	Capaian/Kondisi Saat ini	Standar yang digunakan	Faktor yang Mempengaruhi		Permasalahan Pelayanan SKPD
			Internal	Eksternal	
Layanan OPD	Tingkat keterlayanan pendidikan menengah dibawah 100 %	APS usia 16-18 tahun APK Dikmen APS usia 4-18 tahun yang berkebutuhan khusus APK Pendidikan Khusus	Ketersediaan daya tampung SMA	Sebaran penduduk yang tidak merata hingga ke pulau-pulau kecil	Tingkat akses pendidikan menengah dan pendidikan khusus masih rendah
			Ketersediaan layanan pendidikan khusus yang terbatas	Rendahnya pemahaman masyarakat bagi siswa yang berkebutuhan khusus	
			Angka melanjutkan ke Dikmen masih rendah	Masih ada beberapa kabupaten/kota yang belum menuntaskan wajib belajar pendidikan dasar	
Layanan OPD	% sekolah yang terakreditasi min B baru mencapai 67,17 %	Akreditasi Sekolah	Pemenuhan 8 standar nasional pendidikan	Partisipasi masyarakat dibidang pendidikan	Mutu pendidikan menengah dan pendidikan khusus yang masih rendah
			Kompetensi guru yang rendah	Motivasi belajar siswa	
Kajian terhadap renstra K/L	Relevansi antara program keahlian SMK dengan potensi daerah dan kebutuhan tenaga kerja yang belum sesuai	% Lulusan SMK yang bekerja	Keterbatasan Unit Produktif SMK	Dukungan Dunia usaha dan Dunia Industri.	Belum relevannya program keahlian SMK dengan potensi daerah dan kebutuhan tenaga kerja
			Ketersediaan Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP-P1) di sekolah	Koordinasi dan kerjasama dengan Instansi Pemerintah Terkait	
			Keterbatasan Guru Produktif SMK	Tidak adanya PT Kependidikan untuk guru produktif SMK	

Berdasarkan identifikasi permasalahan sebagaimana ditampilkan pada tabel di atas, dapat disusun pemetaan permasalahan pelayanan perangkat daerah pada tabel berikut:

Tabel 3.2.  
Pemetaan Permasalahan Pelayanan Dinas Pendidikan

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1	masih rendahnya akses pendidikan masyarakat	Angka Melanjutkan ke jenjang pendidikan menengah masih rendah	kurangnya USB
			kurangnya RKB
			kurangnya asrama sekolah
		Masih tingginya angka putus sekolah	kurangnya beasiswa peserta didik
		jarak tempat tinggal ke sekolah cukup jauh	kurangnya sarana mobilitas
		Kemampuan ekonomi	kurangnya perlengkapan

		sebagian masyarakat terbatas.	peserta didik
		Masih ada anak berkebutuhan khusus tidak sekolah	Terbatasnya jumlah Satuan pendidikan khusus
			Masih ada anak berkebutuhan khusus yang belum teridentifikasi
2	Mutu Pendidikan menengah dan pendidikan khusus yang masih rendah	Belum terpenuhinya standar sarana dan prasarana	kurangnya sarana prasarana mutu terkait mutu
			kurangnya Penyediaan Buku Teks Pelajaran Muatan Lokal
		Belum terpenuhinya standar Guru dan Tenaga Kependidikan mulai dari kompetensi, kualifikasi, sertifikasi serta sebaran dan jumlah guru dan tenaga kependidikan	Kurang tertatanya Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus
			Masih kurangnya kegiatan pelatihan dan publikasi bahasa dan sastra
			masih kurangnya Fasilitas Kenaikan Pangkat/ Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi bagi GTK
			Masih kurangnya Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik
3	Belum relevannya program keahlian SMK dengan untuk peningkatan sektor unggulan daerah dibidang kelautan, perikanan, pariwisata, pertanian dan perkebunan dan kebutuhan tenaga kerja bidang lainnya	Tidak semua lulusan SMK yang memiliki sertifikat kompetensi	kurangnya jumlah lembaga sertifikasi dan asesor untuk uji kompetesnsi di SMK
		Tidak semua lulusan SMA yang memiliki kompetensi TIK	kompetensi siswa rendah
		Belum banyak lulusan SMK yang terserap di DUDIKA	kurangnya pelatihan TIK
		Belum banyak lulusan SMK yang tidak bekerja melanjutkan pendidikan di PTN dan PTS	
		Belum banyak lulusan SMK yang terserap di DUDIKA	



3.2. TELAAH TUJUAN DAN SASARAN RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2023-2026

Tujuan dalam RPD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2023-2026 sebanyak 6 tujuan, namun yang terkait dengan tugas dan fungsi Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung adalah sebagai berikut:

- 1. Terpenuhinya kapasitas dan kualitas SDM
- 2. Meningkatnya Indeks Reformasi Birokrasi

Sasaran RPD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2023-2026 terdiri dari 19 sasaran, sementara yang terkait dengan Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung adalah: (1) Meningkatkan Pembangunan Manusia; (2) Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan; (3) Menurunkan Tingkat Kemiskinan; (4) Meningkatkan Kesempatan Kerja.

Tabel berikut menjelaskan faktor penghambat dan pendorong pelayanan Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung terhadap pencapaian tujuan dan sasaran RPD Provinsi Kep. Bangka Belitung Tahun 2023-2026:

Tabel 3.3.  
Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan SKPD Terhadap Pencapaian Tujuan dan Sasaran RPD Provinsi Kep. Bangka Belitung

No	Tujuan dan Sasaran	Permasalahan Pelayanan SKPD	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Tujuan: Terpenuhinya kapasitas dan kualitas SDM	1. Tingkat akses pendidikan menengah dan pendidikan khusus masih rendah 2. Mutu pendidikan menengah dan pendidikan khusus yang masih rendah	1. Daya tampung pendidikan menengah dan pendidikan khusus yang terbatas. 2. Belum terpenuhinya 8 standar nasional pendidikan.	1. Ketersediaan anggaran min 20 % dari APBD. 2. Telah tersedianya SMA dan SMK di setiap kecamatan.
2	Tujuan: Menurunnya disparitas pembangunan antar wilayah dan masyarakat	Masih ada masyarakat yang tidak mampu yang harus mendapat layanan pendidikan	Masih adanya biaya personil pendidikan yang harus di bebankan kepada masyarakat	Ketersediaan anggaran min 20 % dari APBD untuk sektor pendidikan
	Sasaran: Menurunkan angka kemiskinan			
	Sasaran: Meningkatkan kesempatan kerja	Belum relevannya program keahlian SMK dengan potensi daerah bidang Pertanian, Peternakan, dan Perkebunan.	1. Keterbatasan guru produktif SMK untuk sektor Pertanian, Peternakan, dan Perkebunan. 2. Ketersediaan Sarana Praktik Produktif SMK Pertanian, Peternakan, dan Perkebunan yang terbatas. 3. Belum tersertifikasi dan terstandarisasinya lulusan SMK bidang Pertanian, Peternakan, dan Perkebunan	1. Ketersediaan SMK bidang Pertanian, Peternakan, dan Perkebunan. Kerjasama kemitraan antara DUDI dan instansi pemerintah lainnya

3	Tujuan: Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan pembangunan demokrasi	Belum terukurnya tingkat kepuasan publik terhadap layanan pendidikan.	1. Belum Optimalnya pengelolaan layanan pendidikan di satuan pendidikan. 2. Sinkronisasi dan koordinasi yang belum optimal untuk penyusunan dokumen perencanaan dan laporan akuntabilitas kinerja	Adanya komitmen dari pemerintah provinsi untuk membangun birokrasi yang bersih dan akuntabel
	Sasaran : Terwujudnya reformasi birokrasi yang berkualitas			

### 3.3. TELAAH RENSTRA K/L DAN RENSTRA KABUPATEN/KOTA

Dokumen rencana strategis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 2020-2024 telah ditetapkan, dengan visi dan misi sampai 2024 yaitu:

*“Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan mendukung Visi dan Misi Presiden untuk mewujudkan Indonesia Maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian melalui terciptanya Pelajar Pancasila yang bernalar kritis, kreatif, mandiri, beriman, bertakwa kepada Tuhan YME, dan berakhlak mulia, bergotong royong, dan berkebinekaan global”.*

Untuk mencapai visi ini dilaksanakan dengan 5 (lima) misi yaitu sebagai berikut :

1. Mewujudkan pendidikan yang relevan dan berkualitas tinggi, merata dan berkelanjutan, didukung oleh infrastruktur dan teknologi.
2. Mewujudkan pelestarian dan pemajuan kebudayaan serta pengembangan bahasa dan sastra.
3. Mengoptimalkan peran serta seluruh pemangku kepentingan untuk mendukung transformasi dan reformasi pengelolaan pendidikan dan kebudayaan.

Pelaksanaan 3 misi pada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dilaksanakan melalui 16 sasaran strategis. Tabel berikut menunjukkan permasalahan pelayanan pada Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung terkait dengan pencapaian sasaran strategis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

**Tabel 3.4.**  
**Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Pencapaian Sasaran Renstra Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2020 - 2024**

No	Sasaran Jangka Menengah Renstra K/L	Permasalahan Pelayanan SKPD Provinsi	Sebagai Faktor	
			Penghambat	Pendorong
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Meningkatnya perilaku positif siswa	- Peningkatan perilaku positif siswa masih lambat	- Kurangnya guru BP di sekolah. - Kurangnya partisipasi masyarakat	Pendidikan keluarga sudah dimas
2	Meningkatnya partisipasi orang tua dan pemangku kepentingan yang terlibat dalam pendidikan	Kurangnya partisipasi masyarakat dan pemangku kepentingan dalam pendidikan.		Adanya perda tentang pendidikan
3	Meningkatnya kualitas sikap guru dan tenaga pendidikan dalam kepribadian, spiritual, dan sosial	Sebagian besar guru memiliki nilai UKG dibawah 50 % Tidak pernah dilakukan penilaian kualitas tenaga kependidikan	Penilaian Kompetensi hanya terbatas pada Kompetensi Pedagogi dan Profesi. Belum ada penilaian kompetensi untuk tenaga	Tersedianya sarana untuk pelatihan kepribadian dan sosial GTK

No	Sasaran Jangka Menengah Renstra K/L	Permasalahan Pelayanan SKPD Provinsi	Sebagai Faktor	
			Penghambat	Pendorong
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
			kependidikan	
4	Meningkatnya peran pelaku budaya dalam melindungi,mengembangkan danmemanfaatkan kebudayaan	Merupakan kewenangan Disbudpar		
5	Meningkatnya akses pendidikananak usia dini dan pendidikanmasyarakat di seluruh provinsi,kabupaten, dan kota		-	-
6	Meningkatnya angka partisipasi penduduk usia pendidikan dasar dan menengah	APK Pendidikan menengah masih belum optimal	Angka melanjutkan SMP yang rendah. Angka DO masih cukup tinggi	Adanya koordinasi dengan Disdik Kab/Kota. Telah disediakan beasiswa miskin
7	Meningkatnya mutu pendidikan anak usia dini dan pendidikan masyarakat yang berwawasan gender dan pendidikan untuk pembangunan berkelanjutan	-	-	-
8	Meningkatnya mutu layanan dan lulusan pendidikan dasar dan menengah	Mutu layanan pendidikan menengah masih rendah	Belum terpenuhinya 8 SNP	Dukungan anggaran pendidikan
9	Meningkatnya profesionalisme dan distribusi guru dan tenaga kependidikan	Nilai rata-rata UKG Guru dibawah 60. Sebagian besar tenaga kependidikan berstatus tenaga tidak tetap. Kekurangan guru Produktif SMK	UKG hanya dilakukan 1 kali setahun. Tidak tersedianya PT Kependidikan di Babel	
10	Meningkatnya lembaga/satuan pendidikan dan pemangku kepentingan yang menyelenggarakan pendidikan keluarga	Belum semua satuan pendidikan memprogramkan kegiatan pendidikan keluarga	Terbatasnya pemahaman pemangku kepentingan tentang pendidikan keluarga	Dapat dilakukan pada
11	Meningkatnya kesadaran dan pemahaman masyarakat akan perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan serta diplomasi budaya untuk pendukung terwujudnya karakter dan jati diri bangsa yang memiliki ketahanan budaya	-	-	-
12	Meningkatnya mutu bahasa dan pemakaiannya sebagai penghela ipteks dan penguat daya saing Indonesia	-	-	-
13	Meningkatnya peran bahasa Indonesia sebagai bahasa perhubungan di kawasan ASEAN	-	-	-
14	Meningkatkan akuntabilitas kinerja Kemendikbud	Penilaian LAKIP Disdik Prov baru mencapai BB	Dokumen Perencanaan yang tidak sinkron	Adanya koordinasi yang baik dengan pihak terkait
15	Dipertahankannya opini laporan keuangan Kemendikbud Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)	-	-	-
16	Meningkatnya pelibatan publik dalam tata kelola pendidikan dan kebudayaan	-	-	-

### 3.4. TELAAH RENCANA TATA RUANG WILAYAH DAN KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS

Seperti diketahui bahwa Provinsi Kepulauan Bangka Belitung merupakan provinsi kepulauan yang terdiri dari 2 (dua) pulau besar serta ratusan pulau kecil yang berpenghuni dan tidak berpenghuni. Sebagian besar wilayah provinsi ini merupakan wilayah pertambangan serta ada beberapa wilayah yang merupakan daerah rawan bencana terutama rawan banjir.

Tabel berikut menunjukkan rencana tata ruang wilayah dan kajian lingkungan hidup strategis yang terkait dengan permasalahan layanan bidang pendidikan :

**Tabel 3.5.**  
**Permasalahan Pelayanan SKPD berdasarkan Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya**

No	Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis terkait Tugas dan Fungsi SKPD	Permasalahan Pelayanan SKPD	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Lokasi pemukiman terletak di daerah kepulauan yang tidak bisa dijangkau oleh transportasi umum	Masyarakat kesulitan untuk mengakses layanan pendidikan yang letaknya jauh dari pemukiman	Lokasi pemukiman masyarakat tidak bisa diakses oleh transportasi umum	Sebagian masyarakat memiliki keinginan untuk melanjutkan pendidikan
2	Pengembangan kawasan ekonomi khusus dibidang kepariwisataan	Belum memadainya Sarpras SMK kepariwisataan	- Keterbatasan lahan pengembangan satuan pendidikan - Keterbatasan Guru Produktif	Kerjasama dengan DUDI ke pariwisataan
3	Daerah rawan bencana	Beberapa satuan pendidikan terletak di daerah rawan banjir	Sulit untuk mengalokasikan rehabilitasi sekolah yang terkena bencana	Telah dilakukan mitigasi bencana di daerah rawan bencana

**3.5. PENENTUAN ISU-ISU STRATEGIS**

Pengidentifikasikan isu strategis merupakan jantung dari proses perencanaan strategis. Misi organisasi sering secara eksplisit maupun implisit dimaknai sebagai suatu isu. Isu strategis sangat penting, karena mereka berperan sentral dalam pengambilan keputusan politis. Pengambilan keputusan politis selalu beranjak dari isu-isu. Perencanaan strategis dapat meningkatkan kualitas proses pengambilan keputusan dengan cara membingkai isu-isu yang penting dan mengirim isu-isu itu ke pengambil keputusan kunci. Ketika isu strategis berhasil diidentifikasi, maka selanjutnya disusun kerangka rincinya dalam beberapa subsekuensi, beberapa keputusan, dan kerangka aksi. Apabila isu strategis berhasil dirinci seperti itu, maka secara politis akan mudah diterima dan lebih lanjut secara teknis dan administratif dapat lebih mudah dikerjakan. Bahkan, secara filosofis dapat dikaitkan dengan nilai dan dasar organisasi baik ditinjau secara moral etis maupun legal. Identifikasi isu strategis secara tipikal harus melalui serangkaian proses berjenjang yang harus dilakukan pelaku perencanaan strategis.

Berdasarkan identifikasi terhadap permasalahan-permasalahan pelayanan pada Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung serta berdasarkan hasil telaah terhadap Visi dan Misi Gubernur, telaah terhadap renstra Kemendikbud dan telaah terhadap RTRW dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Provinsi Kepulauan Bangka

Belitung, dapat ditentukan isu-isu strategis di Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yaitu sebagai berikut :

1. Masih rendahnya angka rata-rata lama sekolah dan angka harapan lama sekolah
2. Masih Rendahnya mutu pendidikan
3. Optimalisasi indeks Reformasi birokrasi

**BAB II****GAMBARAN PELAYANAN DINAS PENDIDIKAN****2.1. TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI DINAS PENDIDIKAN  
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG**

Mengacu pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, ada 5 (lima) kewenangan pada urusan wajib pendidikan yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Adapun Ruang lingkup kewenangan tersebut yaitu sebagai berikut :

a. Ruang Lingkup Manajemen Pendidikan

Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung memiliki kewenangan dalam hal :

- Pengelolaan Pendidikan Menengah
- Pengelolaan Pendidikan Khusus

b. Ruang Lingkup Kurikulum

Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada ruang lingkup kurikulum memiliki kewenangan dalam hal :

- Penetapan Kurikulum Muatan Lokal untuk Pendidikan Menengah.
- Penetapan Kurikulum Muatan Lokal untuk Pendidikan Khusus.

c. Ruang Lingkup Pendidik dan Tenaga Kependidikan

Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada ruang lingkup Pendidik dan Tenaga Kependidikan memiliki kewenangan dalam hal Pemindahan Pendidik dan Tenaga Kependidikan lintas Kabupaten/Kota dalam wilayah Provinsi.

d. Ruang Lingkup Perizinan Penyelenggaraan Pendidikan.

Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada ruang lingkup Perizinan Penyelenggaraan Pendidikan memiliki kewenangan dalam hal :

- Penerbitan izin penyelenggaraan pendidikan menengah yang diselenggarakan oleh masyarakat.
- Penerbitan izin penyelenggaraan pendidikan khusus yang diselenggarakan oleh masyarakat.

Untuk melaksanakan kewenangan ini, telah dibentuk Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan uraian tugas dan fungsi sebagai berikut :

**TUGAS :**

Membantu Gubernur untuk melaksanakan penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang Pendidikan di lingkungan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung berdasarkan azas desentralisasi, dekonsentrasi dan tugas perbantuan.

**FUNGSI :**

1. Perumusan kebijakan teknis bidang Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
2. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum bidang Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
3. Pembinaan dan pelaksanaan tugas Bidang Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung; dan
4. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh gubernur sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Untuk melaksanakan tugas dan fungsi ini, telah ditetapkan Struktur Organisasi dan Tata kerja Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan Peraturan Gubernur Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 58 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Berikut adalah uraian struktur organisasi dan tata kerja Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung:

**1. SEKRETARIAT**

Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab langsung kepada Kepala Dinas Pendidikan. Uraian tugas dan fungsi sekretariat sebagai berikut :

**Tugas :**

Membantu Kepala Dinas melaksanakan pelayanan teknis dan administratif serta koordinasi pelaksanaan tugas di lingkungan dinas pendidikan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

**Fungsi :**

- Koordinasi penyusunan kebijakan, rencana, program, kegiatan, dan anggaran di bidang pendidikan menengah, pendidikan khusus, dan kerjasama antar lembaga, serta tugas pembantuan di bidang pendidikan;
- Pengelolaan data dan informasi di bidang pendidikan menengah, dan pendidikan khusus;
- Koordinasi dan pelaksanaan kerja sama di bidang pendidikan menengah, dan pendidikan khusus;
- Koordinasi pengelolaan dan laporan keuangan dan perbendaharaan di lingkungan dinas pendidikan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
- Penyusunan bahan rancangan peraturan perundang-undangan dan fasilitasi bantuan hukum di bidang pendidikan menengah, dan pendidikan khusus;
- Pelaksanaan urusan organisasi dan tataaksana di lingkungan dinas pendidikan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
- Pelaksanaan urusan kepegawaian di lingkungan dinas pendidikan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
- Penyusunan bahan pelaksanaan urusan tugas pembantuan dan pengelolaan dana dekonsentrasi di bidang pendidikan yang meliputi fasilitasi pelaksanaan ujian nasional untuk sekolah menengah pertama dan pendidikan kesetaraan, fasilitasi pelaksanaan akreditasi pendidikan menengah dan pendidikan khusus, fasilitasi pengembangan karir pendidik, *penyiapan bahan rekomendasi izin pendirian dan penutupan sekolah menengah kerja sama*, dan tugas-tugas pembantuan lainnya;
- Koordinasi dan penyusunan bahan publikasi dan hubungan masyarakat di bidang pendidikan menengah dan pendidikan khusus;
- Koordinasi pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan di bidang pendidikan menengah dan pendidikan khusus;
- Pengelolaan barang milik daerah di lingkungan dinas pendidikan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung; dan
- Pelaksanaan urusan ketatausahaan dan kerumahtanggaan di lingkungan dinas pendidikan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Pada sekretariat terdapat 3 unit tugas, yaitu Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, Sub Bagian Keuangan dan Sub Bagian Perencanaan. Adapun uraian dari unit tugas tersebut yaitu sebagai berikut :



**A. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian**

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang bertanggungjawab langsung kepada Sekretaris. Adapun uraian tugas dan fungsi dari Subbag Umum dan Kepegawaian yaitu sebagai berikut :

**Tugas :**

Membantu Sekretaris melaksanakan Penataan administrasi umum perkantoran, Pemenuhan sarana dan prasarana perkantoran, Penataan dan pengembangan Organisasi dan Penataan kepegawaian serta disiplin pegawai di lingkungan Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

**B. Sub Bagian Keuangan**

Sub Bagian Keuangan dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian (Kasubbag) yang bertanggungjawab langsung kepada Sekretaris. Adapun uraian tugas dan fungsi dari Sub Bagian Keuangan yaitu sebagai berikut :

**Tugas :**

Membantu sekretaris melakukan penatausahaan keuangan, di lingkungan Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

**C. Sub Bagian Perencanaan**

Sub Bagian Perencanaan, Kerjasama antar Lembaga dan Tugas Pembantuan dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian (Kasubbag) yang bertanggungjawab langsung kepada Sekretaris. Adapun tugas dan fungsi Sub Bagian Perencanaan yaitu sebagai berikut :

**Tugas :**

Membantu sekretaris melaksanakan penyusunan Perencanaan, Pendataan, Monitoring dan Evaluasi pelaksanaan pembangunan bidang pendidikan serta melaksanakan kerjasama antar lembaga dan tugas pembantuan bidang pendidikan di lingkungan Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

**2. BIDANG PEMBINAAN SMA**

Bidang Pembinaan SMA dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang bertanggungjawab langsung kepada Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Bidang Pembinaan SMA memiliki tugas dan fungsi sebagai berikut:

**Tugas :**

Membantu Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Pelaksanaan penyelenggaraan penyusunan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan sekolah menengah atas dilingkungan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

**Fungsi :**

- penyusunan bahan perumusan dan koordinasi pelaksanaan kebijakan di bidang kurikulum dan penilaian, kelembagaan dan sarana prasarana, serta peserta didik dan pembangunan karakter sekolah menengah atas;
- pelaksanaan kebijakan di bidang kurikulum dan penilaian, kelembagaan dan sarana prasarana, serta peserta didik dan pembangunan karakter sekolah menengah atas;
- penyusunan bahan penetapan kurikulum muatan lokal sekolah menengah atas;
- penyusunan bahan penerbitan izin pendirian, penataan, dan penutupan sekolah menengah atas;
- penyusunan bahan pembinaan pelaksanaan kurikulum dan penilaian, kelembagaan dan sarana prasarana, serta peserta didik dan pembangunan karakter sekolah menengah atas;
- penyusunan bahan pembinaan bahasa dan sastra daerah yang penuturnya lintas daerah kabupaten/ kota dalam 1 (satu) daerah provinsi;
- pelaksanaan pemantauan dan evaluasi di bidang kurikulum dan penilaian, kelembagaan dan sarana prasarana, serta peserta didik dan pembangunan karakter sekolah menengah atas; dan
- pelaporan di bidang kurikulum dan penilaian, kelembagaan dan sarana prasarana, serta peserta didik dan pembangunan karakter sekolah menengah atas.

**3. BIDANG PEMBINAAN SMK**

Bidang Pembinaan SMK dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang bertanggungjawab langsung kepada Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Bidang Pembinaan SMK memiliki tugas dan fungsi sebagai berikut :

**Tugas :**

Membantu Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung melaksanakan penyusunan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang

pembinaan sekolah menengah kejuruan dilingkungan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

**Fungsi**

- Penyusunan bahan perumusan dan koordinasi pelaksanaan kebijakan di bidang kurikulum dan penilaian, kelembagaan dan sarana prasarana, serta peserta didik dan pembangunan karakter sekolah menengah kejuruan;
- Pelaksanaan kebijakan di bidang kurikulum dan penilaian, kelembagaan dan sarana prasarana, serta peserta didik dan pembangunan karakter sekolah menengah kejuruan;
- penyusunan bahan fasilitasi kerja sama industri sekolah menengah kejuruan;
- Pengkajian pemberian izin penyelenggaraan SMK oleh masyarakat.
- Pengkajian kurikulum muatan lokal jenjang pendidikan SMK.
- Pembinaan penilaian hasil pembelajaran.
- Pelaksanaan Pembinaan Kesiswaan dan pembangunan karakter pada jenjang pendidikan SMK.
- Analisa kebutuhan Pemenuhan sarana dan prasana pendidikan pada satuan pendidikan jenjang SMK.
- Pembinaan pengelolaan kelembagaan satuan pendidikan jenjang SMK.

**4. BIDANG PEMBINAAN PENDIDIKAN KHUSUS**

Bidang Pembinaan Pendidikan Khusus dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang bertanggungjawab langsung kepada Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Bidang Pembinaan Pendidikan Khusus memiliki tugas dan fungsi sebagai berikut :

**Tugas :**

Membantu Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menyelenggarakan layanan pendidikan khusus di lingkungan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

**Fungsi :**

- penyusunan bahan perumusan dan koordinasi pelaksanaan kebijakan di bidang kurikulum dan penilaian, kelembagaan dan sarana prasarana, serta peserta didik dan pembangunan karakter pendidikan khusus;

- pelaksanaan kebijakan di bidang kurikulum dan penilaian, kelembagaan dan sarana prasarana, serta peserta didik dan pembangunan karakter pendidikan khusus;
- penyusunan bahan penetapan kurikulum muatan lokal pendidikan khusus;
- penyusunan bahan penerbitan izin pendirian, penataan, dan penutupan satuan pendidikan khusus;
- penyusunan bahan pembinaan pelaksanaan kurikulum dan penilaian, kelembagaan dan sarana prasarana, serta peserta didik dan pembangunan karakter pendidikan khusus;
- pelaksanaan pemantauan dan evaluasi di bidang kurikulum dan penilaian, kelembagaan dan sarana prasarana, serta peserta didik dan pembangunan karakter pendidikan khusus; dan
- Pelaksanaan pelayanan deteksi dini dan terapi bagi penderita autisme.
- pelaporan di bidang kurikulum dan penilaian, kelembagaan dan sarana prasarana, serta peserta didik dan pembangunan karakter pendidikan khusus.

## **5. BIDANG GURU DAN TENAGA KEPENDIDIKAN**

Bidang Guru dan Tenaga Kependidikan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang bertanggungjawab langsung kepada Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Rincian tugas dan fungsi Bidang Guru dan Tenaga Kependidikan dirinci sebagai berikut :

### **Tugas :**

Membantu Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dalam penataan dan pengelolaan Guru dan Tenaga Kependidikan pada jenjang Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus.

### **Fungsi :**

- Penyusunan bahan kebijakan terkait dengan pengelolaan guru dan tenaga kependidikan pada jenjang pendidikan menengah dan pendidikan khusus.
- Penerapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pengelolaan dan penataan guru dan tenaga kependidikan pada jenjang pendidikan menengah dan pendidikan khusus.
- Pemberian perlindungan dan penghargaan kepada guru dan tenaga kependidikan jenjang pendidikan menengah dan pendidikan khusus.

- Pengkoordinasian dan pelaksanaan Peningkatan Kompetensi guru dan tenaga kependidikan pada jenjang pendidikan menengah dan pendidikan khusus.
- Pengkoordinasian dan pelaksanaan kajian dan analisa kebutuhan pendidik dan tenaga kependidikan pada jenjang pendidikan menengah dan pendidikan khusus.
- Pemberian rekomendasi mutasi guru dan tenaga kependidikan lintas kabupaten/kota dalam Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Mengingat rentang kendali yang sangat luas serta dengan mempertimbangkan letak geografis Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sebagai provinsi kepulauan, maka terdapat beberapa Cabang Dinas Pendidikan di lingkungan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Adapun cabang dinas tersebut yaitu sebagai berikut :

#### **1. Cabang Dinas Pendidikan Wilayah Pangkalpinang dan Bangka**

Cabang Dinas Pendidikan Wilayah Pangkalpinang dan Bangka dipimpin oleh seorang Kepala Cabang Dinas yang bertanggungjawab kepada Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Uraian tugas dan fungsi dari Cabang Dinas Pendidikan Wilayah Pangkalpinang dan Bangka yaitu sebagai berikut :

##### **Tugas :**

Membantu Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dalam pengelolaan satuan pendidikan provinsi di wilayah Kota Pangkalpinang dan Kabupaten Bangka.

##### **Fungsi :**

- Pembinaan dan pengawasan pelayanan pada Satuan Pendidikan Provinsi di lingkungan Kota Pangkalpinang dan Kabupaten Bangka.
- Pelaksanaan administrasi umum di lingkungan Cabang Dinas Pendidikan Wilayah Pangkalpinang dan Bangka.
- Koordinasi penyusunan perencanaan pada tingkat satuan pendidikan provinsi di lingkungan Kota Pangkalpinang dan Kabupaten Bangka.
- Penyelenggaraan pembinaan kegiatan kesiswaan pada satuan pendidikan provinsi di tingkat Kota Pangkalpinang dan Kabupaten Bangka.
- Pembinaan dan pengawasan disiplin pegawai di lingkungan Satuan Pendidikan Provinsi dan Cabang Dinas Pendidikan Wilayah Pangkalpinang dan Bangka.
- Pembinaan dan pengawasan pelaksanaan kurikulum dan pelaksanaan penilaian di satuan pendidikan provinsi pada Kota Pangkalpinang dan Kabupaten Bangka.

## **2. Cabang Dinas Pendidikan Wilayah Bangka Barat**

Cabang Dinas Pendidikan Wilayah Bangka Barat dipimpin oleh seorang Kepala Cabang Dinas yang bertanggungjawab kepada Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Uraian tugas dan fungsi dari Cabang Dinas Pendidikan Wilayah Bangka Barat yaitu sebagai berikut :

### **Tugas :**

Membantu Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dalam pengelolaan satuan pendidikan di wilayah Kabupaten Bangka Barat.

### **Fungsi :**

- Pembinaan dan pengawasan pelayanan pada Satuan Pendidikan Provinsi di lingkungan Kabupaten Bangka Barat
- Pelaksanaan administrasi umum di lingkungan Cabang Dinas Pendidikan Wilayah Bangka Barat.
- Koordinasi penyusunan perencanaan pada tingkat satuan pendidikan provinsi di lingkungan Kabupaten Bangka Barat.
- Penyelenggaraan pembinaan kegiatan kesiswaan pada satuan pendidikan provinsi di tingkat Kabupaten Bangka Barat.
- Pembinaan dan pengawasan disiplin pegawai di lingkungan Satuan Pendidikan Provinsi dan Cabang Dinas Pendidikan Wilayah Bangka Barat.
- Pembinaan dan pengawasan pelaksanaan kurikulum dan pelaksanaan penilaian di satuan pendidikan provinsi pada Kabupaten Bangka Barat.

## **3. Cabang Dinas Pendidikan Wilayah Bangka Tengah dan Bangka Selatan.**

Cabang Dinas Pendidikan Wilayah Bangka Tengah dan Bangka Selatan dipimpin oleh seorang Kepala Cabang Dinas yang bertanggungjawab kepada Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Uraian tugas dan fungsi dari Cabang Dinas Pendidikan Wilayah Bangka Tengah dan Bangka Selatan yaitu sebagai berikut :

### **Tugas :**

Membantu Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dalam pengelolaan satuan pendidikan di wilayah Kabupaten Bangka Tengah dan Kabupaten Bangka Selatan.

### **Fungsi :**

- Pembinaan dan pengawasan pelayanan pada Satuan Pendidikan Provinsi di lingkungan Kabupaten Bangka Tengah dan Kabupaten Bangka Selatan.

- Pelaksanaan administrasi umum di lingkungan Cabang Dinas Pendidikan Wilayah Bangka Tengah dan Bangka Selatan.
- Koordinasi penyusunan perencanaan pada tingkat satuan pendidikan provinsi di lingkungan Kabupaten Bangka Tengah dan Kabupaten Bangka Selatan.
- Penyelenggaraan pembinaan kegiatan kesiswaan pada satuan pendidikan provinsi di tingkat Kabupaten Bangka Tengah dan Kabupaten Bangka Selatan.
- Pembinaan dan pengawasan disiplin pegawai di lingkungan Satuan Pendidikan Provinsi dan Cabang Dinas Pendidikan Wilayah Bangka Tengah dan Bangka Selatan.
- Pembinaan dan pengawasan pelaksanaan kurikulum dan pelaksanaan penilaian di satuan pendidikan provinsi pada Kabupaten Bangka Tengah dan Bangka Selatan.

#### **4. Cabang Dinas Pendidikan Wilayah Belitung dan Belitung Timur**

Cabang Dinas Pendidikan Wilayah Belitung dan Belitung Timur dipimpin oleh seorang Kepala Cabang Dinas yang bertanggungjawab kepada Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Uraian tugas dan fungsi dari Cabang Dinas Pendidikan Wilayah Belitung dan Belitung Timur yaitu sebagai berikut :

##### **Tugas :**

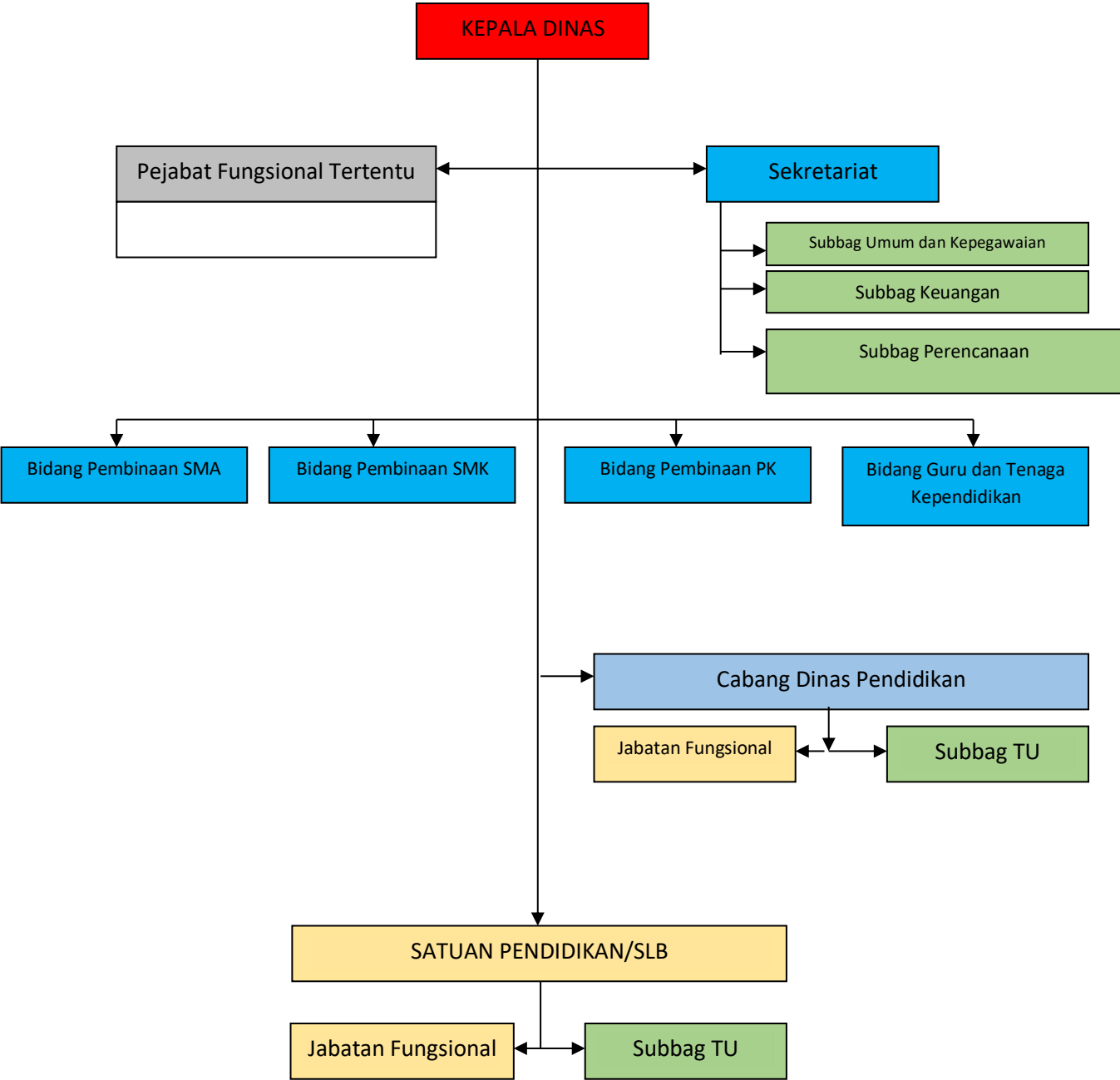
Membantu Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dalam pengelolaan satuan pendidikan provinsi di wilayah Kabupaten Belitung dan Belitung Timur.

##### **Fungsi :**

- Pembinaan dan pengawasan pelayanan pada Satuan Pendidikan Provinsi di lingkungan Kabupaten Belitung dan Belitung Timur.
- Pelaksanaan administrasi umum di lingkungan Cabang Dinas Pendidikan Wilayah Belitung dan Belitung Timur.
- Koordinasi penyusunan perencanaan pada tingkat satuan pendidikan provinsi di lingkungan Kabupaten Belitung dan Kabupaten Belitung Timur.
- Penyelenggaraan pembinaan kegiatan kesiswaan pada satuan pendidikan provinsi di tingkat Kabupaten Belitung dan Belitung Timur.
- Pembinaan dan pengawasan disiplin pegawai di lingkungan Satuan Pendidikan Provinsi dan Cabang Dinas Pendidikan Wilayah Belitung dan Belitung Timur.
- Pembinaan dan pengawasan pelaksanaan kurikulum dan pelaksanaan penilaian di satuan pendidikan provinsi pada Kabupaten Belitung dan Kabupaten Belitung Timur.

Pada Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung juga terdapat Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) berupa satuan pendidikan. Satuan Pendidikan tersebut berupa Sekolah Menengah Atas (SMA) dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK). Selain itu juga terdapat UPTD yang mengelola Pendidikan Khusus terpadu yang selanjutnya disebut dengan Sekolah Luar Biasa (SLB). Satuan pendidikan khusus yang dikelola oleh Sekolah Luar Biasa bentuk Taman kanak-kanan luar biasa (TKLB), Sekolah Dasar Luar Biasa (SDLB), Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa (SMPLB), Sekolah Menengah Atas Luar Biasa (SMALB) dan Sekolah Menengah Kejuruan Luar Biasa (SMKLB).

Struktur organisasi dan tata kerja Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung secara lengkap dapat dilihat pada gambar berikut :



**Gambar 2.**  
**Struktur Organisasi Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung**



2.2. SUMBER DAYA DINAS PENDIDIKAN PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

1. Sumber Daya Manusia (SDM)

Hingga saat ini terdapat 4.033 orang pegawai di lingkungan Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung baik yang berstatus PNS maupun Non PNS. Untuk yang berstatus PNS seluruhnya berjumlah 2.192 orang dan yang non PNS seluruhnya berjumlah 1.841 orang yang tersebar pada Kantor Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung maupun pada Satuan Pendidikan Menengah dan Satuan Pendidikan Khusus.

a. SDM PNS pada Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

1. SDM PNS pada Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung berdasarkan jenis kelamin

Tabel 2.1.  
Pegawai di lingkungan Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung berdasarkan jenis kelamin

JUMLAH PEGAWAI	JENIS KELAMIN	
	L	P
81	44	37
2,090	940	1,150
10	9	1
5	5	-
3	2	1
3	3	-
2192	1003	1189

2. SDM PNS pada Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung berdasarkan Tingkat Pendidikan

Data berikut menunjukkan SDM PNS di Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sangat didominasi oleh pendidikan sarjana (S1). Pendidikan tingkat SMA terbanyak kedua, sementara pendidikan magister (S2) semakin meningkat. Kualifikasi pendidikan sudah sangat baik, namun masih ada beberapa SDM yang perlu ditingkatkan kualifikasinya.

Tabel 2.2.  
Pegawai di lingkungan Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung  
Berdasarkan Tingkat Pendidikan

S-2	S-1	D-4	D-3	D-2	D-1	SLTA	SLTP	SD
12	50	-	13	1	-	5	-	-
97	1,781	6	74	13	-	112	3	4
3	5	-	1	-	-	1	-	-
-	3	-	1	-	-	1	-	-
-	3	-	-	-	-	-	-	-
1	2	-	-	-	-	-	-	-
113	1,844	6	89	14	-	119	3	4

3. SDM PNS pada Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung berdasarkan Golongan.

Tabel 2.3.  
Pegawai di lingkungan Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung  
berdasarkan Golongan

IV/d	IV/c	IV/b	IV/a	III/d	III/c	III/b	III/a	II/d	II/c	II/b	II/a	I/d	I/c
1	-	5	5	19	20	9	10	8	2	1	1	-	-
1	-	38	345	265	603	472	254	31	16	52	5	3	2
-	-	-	-	2	2	4	2	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	1	2	-	-	2	-	-	-	-	-
-	-	-	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-
2	-	43	352	289	629	485	266	41	18	53	6	3	2

2. Sumber Daya Sarana dan Prasarana
- a. Sumber daya Sarana dan Prasarana Dinas.

Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung memiliki kantor yang beralamat di Jalan Pulau Bangka Kel. Air Itam – Pangkalpinang. Kantor berlantai

2. Pada kantor Dinas Pendidikan terdapat 1 (satu) ruang pertemuan kecil dan 1 (satu) ruang pertemuan besar. Seluruh ruangan di kantor Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung telah dilengkapi dengan Air Conditioner (AC) dan kamera pengaman (CCTV). Untuk mendukung kerja pegawai, di lingkungan kantor Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Belitung dilengkapi dengan jaringan internet beserta komputer dan printer, lemari arsip dan filling cabinet, meja dan kursi kerja, meubelair tamu serta meja dan kursi rapat.

b. Sumber daya sarana dan prasarana Satuan Pendidikan.

Hingga saat ini pada di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menyelenggarakan 43 (empat puluh tiga) SMA Negeri, 35 (tiga puluh lima) SMK dan 7 (tujuh) SLB. Selain itu, juga terdapat 28 (dua puluh delapan) SMA Swasta, 21 (dua puluh satu) SMK swasta dan 2 (dua) SLB swasta. Semua satuan pendidikan ini tersebar merata di 7 Kabupaten/Kota di lingkungan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Tabel berikut menunjukkan jumlah satuan pendidikan negeri dan swasta di lingkungan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

**Tabel 2.4.**  
**Jumlah SMA, SMK dan SLB**

No	Wilayah	SMA			SMK			SLB			TOTAL
		Jml	N	S	Jml	N	S	Jml	N	S	
1	Kab. Bangka	17	10	7	11	5	6	2	1	1	30
2	Kab. Bangka Barat	10	6	4	9	5	4	1	1	0	19
3	Kab. Belitung	7	4	3	7	5	2	1	1	0	14
4	Kab. Belitung Timur	7	5	2	8	4	3	1	1	0	15
5	Kab. Bangka Selatan	12	8	4	7	6	1	1	1	0	18
6	Kab. Bangka Tengah	8	6	2	5	5	0	1	1	0	13
7	Kota Pangkalpinang	10	4	6	9	5	4	2	1	1	21
Total	Total	71	43	28	55	35	20	9	7	2	130

Untuk sekolah yang diselenggarakan oleh Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung maupun yang diselenggarakan oleh masyarakat, sebagian telah dilengkapi dengan ruang kelas, ruang kepala sekolah, ruang guru, perpustakaan, laboratorium dan ruang penunjang lainnya serta sarana olahraga. Pembangunan sarana dan prasarana pada satuan pendidikan SMA, SMK dan SLB di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung masih diperlu dibangun dan ditingkatkan melalui pembangunan unit sekolah baru, ruang kelas belajar, asrama sekolah, rumah dinas kepala sekolah dan guru. Sementara peningkatan perlu dilakukan melalui rehabilitasi sarpras, pengadaan meubelair.

2.3. KINERJA PELAYANAN DINAS PENDIDIKAN PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

Pengukuran kinerja dari sasaran strategis dilakukan oleh Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan menggunakan kategorisasi/predikat capaian kinerja sebagaimana dimuat dalam Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 sebagai berikut:

Tabel 2.6  
Skala Nilai Peringkat Kinerja

No.	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Predikat Kinerja	
1	91 ≤ 100	Sangat Tinggi	ST
2	76 ≤ 90	Tinggi	T
3	66 ≤ 75	Sedang	S
4	51 ≤ 65	Rendah	R
5	. ≤ 50	Sangat Rendah	SR

Tabel 2.7  
Capaian Kinerja Dinas Pendidikan  
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2021

INDIKATOR KINERJA	TARGET 2021	REALISASI 2021	CAPAIAN (%)	PREDIKAT KINERJA	ANALISIS
APK Pendidikan Menengah (%)	87.23	86,49	99.15	Sangat Tinggi	Keberhasilan indikator ini didukung semua pemangku kepentingan dalam dunia Pendidikan, mulai dari pemerintah, pemerintah daerah, legislatif, dan masyarakat. Semua elemen menunjukkan komitmen dan kontribusi positif dalam pencapaian realisasi sasaran ini.
APK Pendidikan Khusus (%)	60	100	166.6	sangat tinggi	Keberhasilan indikator ini didukung semua pemangku kepentingan dalam dunia Pendidikan, mulai dari pemerintah, pemerintah daerah, legislatif, dan masyarakat. Semua elemen menunjukkan komitmen dan kontribusi positif dalam pencapaian realisasi sasaran ini.

Rata-rata nilai assessment siswa	415	-	-	(belum ada penilaian/belum bisa dihitung karena assesmen PISA diundur dan akan dilaksanakan kembali pada bulan Mei 2022 ).	
Lulusan SMK yang bekerja dan melanjutkan pendidikan vokasi	80	80	100	Sangat Tinggi	Keberhasilan indikator ini didukung komitmen pimpinan dan sumberdaya
Nilai RB Dinas Pendidikan	90	90	100	Sangat Tinggi	Keberhasilan indikator ini didukung komitmen pimpinan.

Data di atas menunjukkan bahwa kinerja pelayanan Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2021 secara rata-rata sangat tinggi karena target kinerja pelayanan dapat terealisasi dengan sangat baik. Keberhasilan pelayanan ini tentu saja dipengaruhi oleh berbagai faktor antara lain faktor kepemimpinan, kerja sama, koordinasi antar lintas sektor terutama dukungan anggaran untuk Bidang Pendidikan.

Kinerja Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung juga dapat dilihat dari capaian pelaksanaan penerapan SPM. Data berikut menunjukkan bahwa penerapan SPM untuk pelayanan pada pendidikan khusus sudah 100%. Hal ini membuktikan bahwa Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung memiliki komitmen yang tinggi dalam pelaksanaan penerapan SPM pendidikan khusus.

Sementara itu capaian SPM pada pendidikan SMA masih dibawah target. Hal ini merupakan pekerjaan rumah bagi Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang harus diselesaikan.

Tabel 2.8  
Capaian Kinerja SPM Dinas Pendidikan  
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2021

No.	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Target	Realisasi
1.	Pendidikan Menengah	Jumlah Warga Negara Usia 16-18 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah	100%	86%
2.	Pendidikan Khusus	Jumlah Warga Negara Usia 4 – 18 tahun yang termasuk dalam penduduk dissabilitas yang berpartisipasi dalam pendidikan Khusus.	100%	100%

2.4. TANTANGAN DAN PELUANG PENGEMBANGAN DINAS PENDIDIKAN PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

Mengacu ketentuan pada Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, telah ditetapkan bahwa kewenangan Pemerintah Provinsi yaitu untuk melaksanakan fungsi pendidikan sebagai penyelenggara pendidikan menengah dan pendidikan khusus. Selain itu Gubernur juga memiliki fungsi sebagai wakil pemerintah pusat di daerah yang pada pelaksanaannya yaitu melakukan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan kewenangan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota dibidang pendidikan.

Berdasarkan hal ini, maka Tantangan dan Peluang Pengembangan Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung diarahkan untuk melaksanakan kewenangan sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah serta melaksanakan fungsi Gubernur selaku wakil Pemerintah Pusat di daerah.

Berdasarkan hasil analisis terhadap Renstra Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Renstra Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota, hasil telaahan terhadap Rencana Tata Ruang dan Wilayah (RTRW) serta analisis terhadap Kajian Lingkungan Hidup Strategis, diketahui bahwa tantangan dan peluang pengembangan Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tahun 2023 – 2026 yaitu sebagai berikut:

A. Peningkatan Akses Layanan Pendidikan

Tantangan	<div>1. Belum optimalnya capaian layanan akses pendidikan menengah yang diukur dengan capaian APK Pendidikan Menengah;</div> <div>2. Rendahnya pemahaman masyarakat terhadap siswa yang berkebutuhan khusus terutama untuk jenis kebutuhan khusus siswa dengan katagori slow learner (lambat belajar) serta penderita autis.</div>
Peluang	<div>1. Adanya komitmen Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung untuk menuntaskan wajib belajar hingga pendidikan menengah.</div> <div>2. Telah tersedianya Satuan Pendidikan Menengah di seluruh kecamatan di wilayah provinsi Kepulauan Bangka Belitung.</div>

B. Peningkatan Mutu Layanan Pendidikan

Tantangan	<div>1. Masih ada satuan pendidikan yang terakreditasi C dan belum terakreditasi.</div> <div>2. Masih ada guru SMA, SMK dan SLB yang belum memenuhi</div>
-----------	---

	<p>kualifikasi minimal S1/D4.</p> <ol style="list-style-type: none"><li>3. Kompetensi guru yang belum memadai jika diukur dari hasil Uji Kompetensi Guru (UKG).</li><li>4. Keterbatasan Guru dan Tenaga Kependidikan yang berstatus PNS terutama untuk satuan pendidikan di daerah terpencil.</li><li>5. Kondisi sarana dan prasarana pendidikan di jenjang SMA, SMK dan SLB yang belum sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan (SNP).</li><li>6. Keterbatasan lahan pada satuan pendidikan SMA, SMK dan SLB terutama di daerah perkotaan sehingga sulit untuk mengembangkan satuan pendidikan tersebut .</li><li>7. Masih ada satuan pendidikan yang sulit dijangkau oleh jaringan listrik dan jaringan internet terutama di daerah terpencil.</li></ol>
Peluang	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Adanya komitmen Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung untuk meningkatkan mutu pendidikan menengah dan pendidikan khusus sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan dan Pengelolaan Pendidikan.</li><li>2. Sebagian besar satuan pendidikan SMA, SMK dan SLB telah terakreditasi minimal B.</li><li>3. Tingkat kesejahteraan guru dan tenaga kependidikan yang cukup memadai.</li></ol>

## BAB I PENDAHULUAN

### 1.1. LATAR BELAKANG

Pembangunan Sumber Daya Manusia merupakan bagian proses dan tujuan pembangunan nasional termasuk juga bagian dari proses dan tujuan pembangunan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Memang disadari bahwa sumber daya manusia memegang peranan penting dalam proses keberhasilan suatu pembangunan. Pembangunan merupakan suatu proses perubahan di segala bidang kehidupan yang dilakukan secara sengaja berdasarkan suatu rencana tertentu. Sumber daya manusia yang berkualitas sangat dibutuhkan dalam mewujudkan manusia Indonesia seutuhnya. Karena sumber daya manusia yang berkualitas dibutuhkan untuk menghadapi berbagai tantangan globalisasi dengan tingkat perubahan yang cepat dan radikal di berbagai aspek kehidupan manusia karena adanya teknologi.

Pembangunan bidang pendidikan merupakan salah satu bentuk dalam pembangunan Sumber Daya Manusia, bahkan merupakan upaya yang utama disamping pembangunan bidang kesehatan. Pembangunan dibidang pendidikan bukan hanya sekadar pemerataan pendidikan saja, tetapi juga peningkatan kualitas serta relevansi pendidikan. Upaya tersebut yaitu seperti melakukan gerakan pendidikan anak usia dini serta penuntasan dan peningkatan kualitas pendidikan dasar dan menengah hingga pemberian kesempatan pendidikan tinggi bagi masyarakat.

Mengingat keterbatasan sumberdaya yang ada untuk pelaksanaan pembangunan, tentunya dibutuhkan sebuah perencanaan strategis pendidikan yang mampu memanfaatkan sumberdaya yang ada sehingga menghasilkan hasil pembangunan bidang pendidikan yang optimal. Perencanaan strategis sendiri merupakan [proses](#) yang dilakukan suatu [organisasi](#) untuk menentukan [strategi](#) atau arahan, serta [mengambil keputusan](#) untuk mengalokasikan [sumber dayanya](#) (termasuk [modal](#) dan [sumber daya manusia](#)) untuk mencapai strategi ini. Dengan adanya perencanaan strategis pada Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung diharapkan akan mampu memberikan arah pembangunan bidang pendidikan 5 tahun kedepan hingga tahun 2026. Dalam Dokumen Rencana Strategis disajikan tujuan, sasaran Perangkat Daerah sampai dengan rencana program dan kegiatan serta pendanaannya.



## 1.2. LANDASAN HUKUM

Dasar hukum yang melandasi penyusunan Rencana Strategis Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2023 – 2026 ini yaitu sebagai berikut:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4268);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73 dan tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 6041);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);

10. Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Non Alam Penyebaran *Corona Virus Diseases 2019 (Covid-19)* sebagai Bencana Nasional (SK Nomor 010750 A);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS dalam penyusunan RPJMD (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 459, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21 dan tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2019 Tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
15. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2021 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir pada Tahun 2022;
16. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 2 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2014-2034 (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2014 Nomor 1 Seri E);
17. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2017 tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2017 Nomor 3 Seri E);
18. Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2017-2022 (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2017 Nomor 10 Seri E);
19. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka

Belitung (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2020 Nomor 1 Seri D).

### **1.3. MAKSUD DAN TUJUAN**

Maksud dari penyusunan Perubahan Rencana Strategis Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2023 – 2026 ini yaitu menyesuaikan arah pembangunan bidang Pendidikan dengan perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sehingga peningkatan pembangunan bidang pendidikan dapat tercapai secara optimal berdasarkan analisis kondisi terkini pendidikan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan memperhatikan segala sumber daya yang tersedia.

Sedangkan tujuan dari penyusunan Rencana Strategis ini yaitu sebagai berikut :

1. Sebagai penjabaran secara detail Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2023 – 2026 untuk perencanaan pembangunan bidang pendidikan.
2. Sebagai alat pedoman untuk pelaksanaan pembangunan bidang pendidikan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

### **1.4. SISTEMATIKA PENULISAN**

Perubahan Rencana Strategis Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2023 – 2026 ini disusun secara sistematis dengan sistematika penulisan sebagai berikut :

#### **BAB I. PENDAHULUAN**

Bab ini berisi tentang latar belakang perubahan penyusunan Renstra, maksud dan tujuan penyusunan, landasan hukum, serta sistematika penulisan.

#### **BAB II. GAMBARAN PELAYANAN DINAS PENDIDIKAN PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG**

Bab ini memuat informasi tentang peran (tugas dan fungsi) Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, mengulas secara ringkas apa saja sumber daya yang dimiliki Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya, mengemukakan capaian-capaian penting yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan Renstra periode sebelumnya, mengemukakan capaian program prioritas yang telah dihasilkan melalui

pelaksanaan RPJMD periode sebelumnya, dan mengulas hambatan-hambatan utama yang masih dihadapi dan dinilai perlu diatasi melalui Renstra ini.

**BAB III. PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI**

Bab ini permasalahan-permasalahan pelayanan SKPD beserta faktor-faktor yang mempengaruhinya, tugas dan fungsi SKPD yang terkait dengan **visi, misi, serta program kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih**, faktor-faktor penghambat ataupun faktor-faktor pendorong dari pelayanan SKPD yang mempengaruhi permasalahan pelayanan SKPD ditinjau dari sasaran jangka menengah Renstra K/L ataupun Renstra SKPD provinsi/kabupaten/kota dan penentuan isu-isu strategis.

**BAB IV. TUJUAN DAN SASARAN**

Bab ini menggambarkan Tujuan dan Sasaran Pembangunan Bidang Pendidikan yang akan dicapai oleh Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tahun 2023 – 2026 dalam rangka mengubah kondisi masa sekarang kearah kondisi yang diharapkan lima tahun mendatang. Tujuan dan Sasaran yang disusun merupakan penjabaran dari **visi dan misi** Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan Tujuan Strategis yang ingin dicapai yang dilengkapi dengan sasaran strategis yang merupakan tolok ukur dari tujuan strategis yang hendak dicapai, serta strategi dan arah kebijakan yang digunakan untuk mencapai tujuan strategis tersebut.

**BAB V. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN.**

Pada Bab ini akan dijelaskan mengenai strategi dan arah kebijakan untuk setiap tujuan dan sasaran yang ingin dicapai beserta dasar-dasar analisis yang digunakan.

**BAB VI. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF**

Pada bab ini akan disampaikan rencana program dan kegiatan yang akan dilaksanakan sesuai dengan strategi dan arah kebijakan yang diambil untuk pencapaian tujuan strategis yang dilengkapi dengan pengukuran kinerja secara bertahap untuk setiap program dan kegiatan yang dilaksanakan serta kelompok sasaran dari masing-masing kegiatan serta pendanaan yang diperlukan untuk pelaksanaan rencana program dan kegiatan.

**BAB VII. INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD**

Pada bagian ini dikemukakan indikator kinerja SKPD yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai SKPD dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD

**LAMPIRAN-LAMPIRAN.**